

TALIBAN MEREBut KEMBALI KEKUASAAN DI AFGHANISTAN

7

Poltak Partogi Nainggolan

Abstrak

Pasca-dua dasawarsa menjatuhkan rezim Taliban dan menduduki Afghanistan. Pada tahun 2021, sebagai aksi pembalasan atas serangan terorisme 9/11, Amerika Serikat (AS) memutuskan meninggalkan Afghanistan demi mencegah mengulangi kesalahan Uni Soviet, yang akan jauh lebih buruk. Beban ekonomi dan human cost yang meningkat akibat pandemi mendorong Presiden Biden menuntaskan keputusan yang telah diambil pendahulunya, Donald Trump. Aksi kekerasan atas pengikut rezim lama kini menghantui negeri sumber konflik internal, setelah Ashraf Ghani melarikan diri ke luar negeri. Aksi militer Taliban dan kekerasan dalam merebut kembali kota-kota di Afghanistan menguatkan keraguan atas perubahan sikap Taliban untuk mau berkompromi berbagi kekuasaan secara damai dengan menggunakan mekanisme demokrasi, yang tidak pernah mereka dukung selama ini. Justifikasi penerapan syariah secara total dan kontinu oleh Taliban dan perebutan hegemoni negara-negara besar di Kawasan, yang menciptakan proxy war, turut menentukan masa depan Afghanistan.

Pendahuluan

L'histoire s'est repete. Sejarah berulang. Afghanistan jatuh kembali ke tangan Taliban, dalam waktu cepat, pada 15 Agustus 2021, di luar perkiraan intelijen Amerika Serikat (AS). Diplomat dan militer AS tunggang-langgang lari dari negeri yang ditaklukkannya hampir dua dasawarsa lalu. Kejadian ini menyerupai jatuhnya Saigon di Vietnam pada tahun 1975, AS melarikan diri dalam suasana *chaos*, mengabaikan para kolaboratornya secara menyedihkan. Perundingan damai dan kesepakatan Trump-

Taliban yang telah berlangsung beberapa kali pada semester kedua tahun 2020 membawa dampak perubahan signifikan bagi masa depan Afghanistan dan Timur Tengah, dan kebijakan AS di kawasan. Keputusan AS, apapun alasannya, baik untuk mengurangi risiko pengorbanan finansial dan nyawa militer AS dalam jangka panjang, maupun demi memberi ruang bagi masa depan Afghanistan, menjadi kontroversial. Ini akan menjadi bencana serius bagi AS sebagai adidaya global akibat mengalirnya pengungsi secara *chaotic*



keluar negeri itu, yang dianggap menjadi tanggung jawab AS (Media Indonesia, 20 Agustus 2021).

Perundingan dengan kelompok Islam yang sangat konservatif dan militan di Afghanistan atas perintah Presiden Donald Trump, antara lain di Doha, Qatar, tidak selalu berlangsung mulus dan menggembirakan bagi AS. Di sela-sela perundingan, tetap berlangsung serangan bom pihak Taliban terhadap militer AS dan Pemerintah Ashraf Ghani. Interval ini menandai upaya masing-masing pihak untuk memengaruhi hasil akhir perundingan. Sejak semula, suasana damai hanya tampak di meja perundingan, bukan di lapangan. Di tengah kegalauan masyarakat dunia atas masa depan Afghanistan, keputusan AS tidak berubah, pasca-dimulainya pemerintahan Joseph Biden. Yang lebih buruk, terlihat kegalauan Ashraf Ghani, mengingat Taliban adalah kelompok militan yang sangat sulit berkompromi karena berpandangan amat konservatif dalam bermasyarakat dan bernegara.

Tulisan ini membahas penyebab dan konsekuensi keputusan AS menarik total pasukannya dari Afghanistan dengan mengabaikan Pemerintah Ghani, sekutu yang dilindunginya selama ini, sehingga dengan mudah dan cepat negeri itu jatuh kembali ke tangan Taliban, musuh utama AS di sana. Mengapa AS membiarkan negeri itu jatuh ke tangan Taliban? Apa implikasinya bagi AS dan situasi Timur Tengah? Kajian ini menjadi penting, karena Timur Tengah merupakan salah satu titik api stabilitas politik dan keamanan global, sehingga setiap resolusi politik di salah satu negara

yang berkonflik di kawasan ini harus dipertimbangkan dampak luasnya.

Invasi AS dan Lemahnya Kinerja Rezim Ghani

Penarikan pasukan AS telah diikuti NATO dan sekutu AS lainnya di Afghanistan, yakni Australia. Sedangkan Jerman sudah menarik militer jauh sebelumnya. Penarikan seluruh pasukan AS ini menandai berakhirnya kehadiran pasukan negara adidaya itu di bumi Afghanistan setelah hampir 20 tahun beroperasi menghancurkan rezim Taliban pasca-9/11, karena dinilai berkolusi dalam serangan Al-Qaeda itu. Taliban saat itu dianggap bertanggung jawab karena melindungi Osama bin Laden dan pengikutnya dalam aksi-aksi terorisme atas AS. Osama dan Taliban memiliki kepentingan yang sama untuk menghancurkan AS, sumber instabilitas dan kehancuran dunia Islam di Timur Tengah.

Kehadiran militer AS di Afghanistan telah menciptakan ketergantungan tinggi pemerintah baru dalam segala hal. Kapasitas militer Afghanistan untuk bisa menjaga keamanan negerinya dari kelompok Taliban yang telah tersingkir, tetap lemah. Menyadari kesia-siaan ini dengan kerugian yang semakin besar, Biden melanjutkan keputusan Trump, dengan segera menarik pasukannya, tanpa pemberitahuan ke Pemerintah Ghani. Perundingan Trump dengan Taliban sejak awal digagas tanpa persetujuan dan dihadiri Pemerintah Ghani. Keputusan Trump bukan murni untuk mewujudkan perdamaian dengan memenuhi syarat yang diajukan Taliban, meninggalkan negeri itu. Sebab, bukan tradisi

AS untuk takluk pada permintaan musuhnya. Namun, karena ingin mengurangi biaya operasi militer AS lebih lama di Afghanistan. Lebih dari US\$88 miliar (Rp1,26 kuadriliun) telah dibelanjakan AS demi keamanan Afghanistan (Kompas, 16 Agustus 2021). Pemerintah Ghani ditinggalkan begitu saja dengan selesainya penarikan militer AS pada akhir Juni 2021.

Pemerintah Ghani pasrah menghadapi kembalinya Taliban di beberapa provinsi dan kota besar. Dalam hitungan minggu, Taliban sukses melancarkan ofensif dan merebut kembali Kunduz, Kandahar, dan Mazhar-i-Sharif, simbol sukses pembalasan AS atas 9/11. Ibukota Kabul, direbut Taliban dalam satu hari saja, karena Ghani bukannya mati-matian mempertahankan Kabul, namun melarikan diri ke Uni Emirat Arab (UEA). Pernyataan demi mencegah pertumpahan darah hanya alasan, sebagai cermin kekecewaan pada AS, patron yang kian menyadari sekutunya hanya patuh dengan dolar dan aksi militer langsung AS. Pemerintah Ghani sempat memanggil kembali kelompok-kelompok milisi sipil untuk membentuk pertahanan nasional, disertai kecemasan, sebab tawaran damai untuk berbagi kekuasaan kepada Taliban pada 28 April 2021, tidak direspon. Ia tahu, negerinya mewarisi sukseki kekerasan sejak lama. Mohammad Najibullah, penguasa terakhir yang bersekutu dengan Soviet, telah disiksa oleh Taliban sebelum dieksekusi mati pada 26 September 1992.

Inisiatif perdamaian pun sudah digagas Iran dan Pakistan, para pelindung Taliban selama ini.

Begitu pula, Indonesia mendukung solusi damai lewat jalur diplomasi dari Jusuf Kalla hingga Menlu Retno L. Marsudi. Namun, kedua belah pihak belum dapat mengatasi perbedaan visi dan kepentingan. Ghani menginginkan Taliban menghentikan dulu peperangan dan aksi kekerasan sebelum perundingan dimulai. Ia mengingatkan sukseki pasca-penarikan Soviet berlangsung dalam situasi Afghanistan yang porak poranda akibat perang saudara. Taliban tetap ingin mengimplementasikan *syariah* secara komprehensif dan konservatif, sedangkan rezim Ghani, produk pemilu, ingin melanjutkan pemerintahan dengan politik demokrasi modernnya.

Implikasi bagi AS dan Keamanan Global

Semula penarikan pasukan AS akan dilakukan pada 11 September 2021, AS sadar Afghanistan masih rapuh, sebagian besar wilayahnya masih harus dipertahankan pasukan AS. Tetapi AS tertekan kebutuhan mengurangi beban militer karena perkembangan ekonomi domestik dan global tidak mendukung akibat pandemi Covid-19. Di samping pembiayaan pasukan yang semakin berat, AS menyadari kehadirannya tidak lagi prospektif. Dibayangkan kegagalan Soviet yang pernah menginvasi dan menduduki Afghanistan selama 29 tahun, AS tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama.

AS semula tidak ingin meninggalkan Afghanistan dalam kondisi yang tidak siap, dengan meninggalkan korban yang besar, dengan status sebagai pihak yang kalah perang. Negara adidaya ini

tidak ingin dipermalukan, terusir sebagai pecundang, dan terbukti gagal berkontribusi bagi stabilisasi jangka panjang bagi wilayah yang disebut sebagai 'kuburan para panglima perang', sejak negeri itu dipimpin *warlords*, para penguasa militer dengan pendukungnya masing-masing. AS sebenarnya tidak akan membiarkan negeri itu mengalami anarkisme tanpa akhir. Berkuasanya kembali Taliban menyebabkan absennya kekuatan Barat. Kepergian AS akan meningkatkan pengaruh China dan Iran, seteru AS, di negeri mayoritas Sunni itu. Perkembangan ini akan memperluas pengaruh Syiah di kawasan Timur Tengah pasca-pemilu di Irak dan Lebanon, dan juga di Libya, Yaman, Syria dan negara Teluk.

Perginya AS bukan berarti tidak pentingnya lagi Timur Tengah yang kaya minyak dan gas, tetapi, sulitnya mendamaikan faksi-faksi yang bertikai di Afghanistan membuat AS pesimis. AS menyadari kehadiran asing di Afghanistan hanya melanjutkan perang saudara yang telah berlangsung selama 40 tahun. Sebelum terlambat, AS dan sekutunya sudah bekesimpulan bahwa perdamaian di Afghanistan hanya dapat diciptakan mereka sendiri. Melalui Utusan Khusus, Zalmay Khalilzad, AS mengeluarkan ancaman, ia dan sekutunya akan memberi sanksi kepada Taliban jika berusaha mengambil alih Afghanistan secara militer, walaupun ini yang terjadi kemudian, dan tidak ada sanksi AS, sehingga Kabul menjadi kacau. Presiden Biden tidak menyesalkan sama sekali berkuasanya kembali Taliban lewat kekuatan militer. Sekutu AS

menyesalkan cara AS yang tidak elegan keluar dari Afghanistan. Politisi AS khawatir, AS akan kehilangan kepercayaan dari sekutu-sekutunya di berbagai belahan dunia.

Taliban kini menjadi kelompok kekuatan Islam yang *powerful* di Afghanistan. Dari bukit-bukit dan wilayah terpencil di Mazhar-i-Sharif, Kunduz, Kandahar, dan lain-lain, mereka turun kembali ke ibukota Kabul untuk berkuasa. Kembalinya Taliban akan menguatkan konservatisme beragama, kekerasan, dan sikap xenophobia di Timur Tengah. Afghanistan akan menjadi sumber instabilitas baru di kawasan setelah Irak, Libya dan Yaman. Kedekatan kelompok konservatif Taliban dan Iran tidak otomatis menciptakan rekonsiliasi Sunni dan Syiah di Timur Tengah yang dipicu perebutan hegemoni antara Saudi Arabia versus Iran sebagai *middle power* yang bangkit.

Afghanistan akan terus memperlihatkan diri sebagai negeri yang tidak berhenti dari pergolakan, akibat sektarianisme dan *proxy war* negara asing. Kunjungan Taliban ke China menambah energi Taliban, di luar dukungan Iran dan Pakistan, untuk berkuasa kembali di Afghanistan. Rusia kini dapat menertawai kekeliruan langkah AS yang mengulangi kesalahan Soviet, Sayang, Indonesia juga tidak mampu mendamaikan sesama kaum Muslim yang berperang di Afghanistan, yang akan menyebabkan mengalirnya gelombang pengungsi hebat, termasuk ke Indonesia.

Mengharapkan Peran Dunia Islam

Melihat situasi yang belum kondusif dewasa ini di banyak

negara berpenduduk mayoritas Muslim, masih sulit mengharapakan peran dan keterlibatan mereka untuk membantu mencari resolusi konflik. Banyak negara masih disibukkan dengan berbagai konflik internal serta masalah domestik baru akibat pandemi Covid-19. Sebagai konsekuensi, mengharapakan peran dan bantuan negara lain, baik secara unilateral maupun bersama dalam organisasi regional, secara realistis menjadi lebih sulit, di luar China, Iran, Rusia dan Pakistan, yang berkepentingan langsung. Namun, keempat negara itu diketahui sebagai sekutu Taliban.

Diplomasi Indonesia sendiri tidak total, dan gagal memengaruhi kekuatan regional dan global. Diplomat Indonesia kurang menyadari bahwa Afghanistan juga merupakan produk kontestasi kekuatan global dalam *proxy war*. Yang lebih memprihatinkan dan disesalkan, dalam kasus Afghanistan, kelompok negara Islam yang tergabung dalam organisasi internasional dan regional kembali tidak berdaya untuk mengambil inisiatif dan berperan mendamaikan saudaranya yang berkonflik sejak lama di Timur Tengah. Jangankan melalui Grup Regional Timur Tengah/Arab/Afrika Utara dalam Uni Parlemen Internasional (IPU), berbagai forum kerja sama yang lebih khusus, seperti Perhimpunan Parlemen Asia (APA) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), selama ini juga sulit mencari jalan keluar yang menawarkan resolusi konflik yang dinilai *fair* dan dapat diterima semua pihak yang berkonflik.

Penutup

Sejarah berulang, Afghanistan ditinggalkan kekuatan asing yang

menginvasinya, setelah Soviet kini AS. Saat ini AS dan para kolaborator lari meninggalkan negeri yang pernah dipertahankan mati-matian dengan biaya dan nyawa warga AS yang tidak sedikit. Sejarah juga mengajarkan, akhir dari ketergantungan pada asing yang selalu buruk bagi tuan rumah.

Dalam sejarah yang panjang, Afghanistan silih berganti dilanda konflik internal, perang saudara, serta invasi dan pendudukan asing. Setelah penarikan total militer AS, muncul pertanyaan, untuk apa AS harus menginvasi negeri itu, menjatuhkan rezim Taliban pasca-9/11 dan mendudukinya selama hampir 20 tahun, jika pada akhirnya harus menyerahkan kembali negeri ke rezim anti-demokrasi dan pro-kebijakan represif dan gemar kekerasan itu? Lebih spesifik, untuk apa AS harus membangun dan membiayai operasional *outposts* dan mengorbankan banyak tentaranya yang masih muda hanya untuk kegagalan membangun rezim demokratis dan menstabilkan Afghanistan?

Referensi

- Barak, Hariz. 2020. "27 September 1996: Kabul Jatuh ke Tangan Taliban, Awali Rezim baru di Afghanistan," *Liputan6.com*, 27 September 2020, diakses 15 Juli 2021.
- Jaramaya, Rizki. 2021. "Akhir Perang Afghanistan." *Republika*, 12 Agustus 2021.
- "Kabul Airport Scenes 'Shameful' for West: German President," *The Jakarta Post*, 17 Agustus 2021.
- "Kekerasan Meningkat di Afghanistan, Presiden Ganti Dua Menteri," *Gatra.com*, 20 Juni 2021, diakses 15 Juli 2021.

"Kenapa Taliban Tak Terkalahkan di Afghanistan 2021? Ini 3 Sebabnya," *Kompas.com*, 16 Agustus 2021, diakses 17 Agustus 2021.

"Presiden Afghanistan Tawarkan Bagi Kekuasaan kepada Taliban," *Republika*, 29 April 2021.

"Presiden Afghanistan Tawarkan Rencana 3 Langkah Perdamaian," *VOAIndonesia.com*, 30 Maret 2021, diakses 15 Juli 2021.

"Presiden Afghanistan Minta Taliban Hentikan Perang," *Detik.com*, Juli 2021, diakses 15 Juli 2021.

"Taliban Capture Key Border Crossing," *Sun*, 15 Juli 2021.

"Taliban Minta Warga Kembali Bekerja," *Media Indonesia*, 20 Agustus 2021.



Poltak Partogi Nainggolan
poltak.nainggolan@dpr.go.id

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia pada tahun 1986, pendidikan S2 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional the University of Birmingham (UK) pada tahun 1999, dan pendidikan S3 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Albert Ludwigs - Universitaet Freiburg (Deutschland) pada 2011 dengan judicium magna cumlaude. Beliau adalah seorang Profesor Riset bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Indonesia dan Rivalitas China, Jepang, dan India" (2018) dan "Proxy War di Timur Tengah" (2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.